

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut etimologis, menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab dalam Kania (2019 hlm 47) ialah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi adalah tindakan berdasarkan desain yang telah direncanakan dengan cermat. Setelah desain dibuat secara cermat, maka implementasi ini mulai dilakukan. Nurdin Usman (2002) menyatakan bahwa “Implementasi itu mengacu pada kegiatan, atau tindakan atas adanya suatu susunan sistem, implementasi lebih dari sekedar suatu kegiatan, tetapi lebih dari itu suatu kegiatan yang telah direncanakan demi tercapainya tujuan kegiatan”. Menerapkan rencana yang telah dipikirkan dengan matang adalah tindakan implementasinya. Implementasi terjadi ketika perencanaan yang salah menghasilkan kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem yang direncanakan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa pengertian implementasi mengacu pada suatu perencanaan yang terstruktur dimana perencanaan tersebut sudah siap diimplementasikan.

b. Tujuan Implementasi

Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022), ada beberapa tujuan implementasi yakni:

- 1) Terdapat tujuan yang paling utama ialah untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disiapkan secara matang, baik yang dibuat oleh individu atau kolektif.

- 2) Tujuan kegiatan ini ialah untuk mengevaluasi dan mencatat proses pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk memperoleh tujuan dalam rancangan atau kebijakan yang ditentukan.
- 4) Bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat untuk secara efektif mengimplementasikan suatu rancangan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
- 5) Pengukuran keberhasilan pada suatu kebijakan yang telah dirumuskan untuk tujuan meningkatkan atau memajukan peningkatan kualitas.

c. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Berikut faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022), diantaranya:

1) Pemahaman Target yang Dituju

Hal ini diperlukan guna membangun sebuah gagasan dan perencanaan tindakan untuk mencapai hasil atau tujuan.

2) Pengadaan Sumber Daya

Hal-hal yang mendukung keefektifan implementasi harus diperhatikan seperti peralatan yang baik dan kinerja personelnnya juga harus baik.

3) Seberapa Detail Menganalisis Resiko

Tim implementasi memikirkan potensi masalah melalui analisis risiko. Seperti hal buruk apa yang bisa terjadi jika strategi tidak dijalankan? Apa yang akan terjadi setelahnya? apakah melakukannya atau tidak melakukannya jauh lebih menguntungkan?

4) Menghargai Waktu Tenggang

Masing-masing peran perlu mengetahui bagian mana yang menjadi tanggung jawabnya agar implementasi dapat berjalan dengan baik. serta perlu ditekankan tanggal penyelesaiannya untuk antisipasi selama perencanaan meskipun jadwal proyek dapat berubah seiring kemajuan proyek

d. Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Proses implementasi melibatkan perencanaan yang cermat, dimana implementasi dimulai hanya ketika fase perencanaan dianggap tidak sempurna.

Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila difokuskan pada peserta didik yang secara konsisten mendemonstrasikan pengamalan nilai Pancasila, khususnya pada aspek-aspek berikut: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Salah satu cara penanaman karakter-karakter tersebut ialah melalui pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5.

P5 ialah salah satu produk kurikulum merdeka yang implementasinya dilakukan di luar mata pelajaran dengan tujuan membangun kemampuan peserta didik yang ada pada setiap individu peserta didik. P5 telah direncanakan dengan hati-hati dan optimal melalui beberapa tahap, dan ini mencakup sejumlah topik yang dapat dipilih oleh sekolah. Prinsip-prinsip dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) :

1) Holistik

Holistik disini memaknai ketika melihat segala hal dengan utuh dan menyeluruh pada semua aspek, Dalam konteks pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, kerangka pemikiran holistik dapat mendorong untuk menyelidiki suatu tema secara keseluruhan dan mengidentifikasi keterkaitan berbagai unsur untuk memahami suatu persoalan secara mendalam.

2) Kontekstual

Prinsip kontekstual ialah upaya dalam membangun kegiatan pendidikan berdasarkan pengalaman sehari-hari yang autentik. Pendekatan ini mendorong guru dan peserta didik untuk menggunakan lingkungan dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai sumber utama materi pembelajaran.

3) Berpusat Pada Peserta Didik

Prinsip berpusat pada peserta didik berlaku untuk strategi instruksional sehingga memotivasi pelajar untuk mengambil peran pembelajaran secara

aktif mengontrol pembelajaran itu sendiri, termasuk memberikan pilihan untuk memilih dan menyarankan tema proyek untuk proyek profil berdasarkan minat peserta didik. Dalam lingkungan pendidikan, peran guru ialah sebagai fasilitator pembelajaran, menawarkan pelajar kesempatan untuk memilih topik berdasarkan kemampuan masing-masing.

4) Eksploratif

Pada hal ini diharapkan perencanaan dan pengimplementasiannya, seorang guru memiliki ketetapan untuk dapat merencanakan dan menyusun kegiatan proyek profil secara terukur sesuai langkah-langkah agar dapat memudahkan pelaksanaan P5. Prinsip eksplorasi mengacu pada gagasan menciptakan area yang luas untuk proses penyelidikan dan pengembangan diri. Pembelajaran ko-kurikuler menjadi fokus proyek untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila, oleh karena itu ada berbagai kemungkinan untuk mengeksplorasi dalam hal materi siswa, alokasi waktu, dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

2. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

a. Konsep Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Kemendikbudristek menyatakan bahwa “Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dibuat untuk mendukung usaha pengembangan karakter dan kemampuan yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang dibangun dengan menggunakan Standar Kompetensi Lulusan” (Kemendikbudristek, 2022). Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu Visi dan Misi Kemendikbud sebagai upayanya untuk menyempurnakan pendidikan karakter sebagaimana tertuang dalam “Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Profil Pelajar Pancasila ialah wujud dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dengan enam ciri utama: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”.

Gambar 2. 1 Enam Indikator Profil Pelajar Pancasila



Sumber: Kemendikbud 2020

Inisiatif untuk meningkatkan visibilitas profil pelajar Pancasila membutuhkan strategi interdisipliner untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di lingkungan terdekat mereka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan metodologi pembelajaran *based learning* yang membedakannya dari pembelajaran berbasis proyek yang digunakan dalam konteks pendidikan formal. Tujuan dari pembelajaran berbasis proyek ialah untuk memberikan pelajar kesempatan untuk terlibat dalam penyelidikan, pemecahan masalah, dan kegiatan pengambilan keputusan. “Project-based Learning merupakan model pembelajaran yang dimana pembelajarannya menggunakan proyek. Peserta didik akan menyelidiki, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis, dan mengumpulkan informasi dengan menggunakan model pembelajaran PjBL.” (Dewi, 2022).

Selanjutnya Stivers 2010 dalam Halimah & Marwati (2022) menggambarkan lebih luas lagi bahwa:

Pembelajaran yang menerapkan PBL mengajarkan peserta didik tidak hanya konten, tapi juga keterampilan-keterampilan penting yang sangat diperlukan peserta didik untuk kehidupan dalam masyarakat. Keterampilan

yang disebutkan di atas mencakup berbagai kemampuan, seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, keterampilan me-manage waktu dan organisasi yang mahir, keterampilan mengamati yang baik, kapasitas penilaian evaluasi diri, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengaturan kelompok, kepemimpinan yang kuat keterampilan, keterampilan berpikir kritis, dan kecakapan untuk menilai baik kinerja individu maupun kolektif.

Dalam *Project-based Learning* (PBL) ini pendidik dapat membantu pelajar menyelesaikan tugas yang menantang dan sulit. Paradigma ini memungkinkan instruktur untuk memimpin pelajar melalui proyek kolaboratif yang menggunakan beberapa sumber informasi pembelajaran dan memungkinkan pelajar untuk memeriksa konten pembelajaran dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, model pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan tingkat berpikir kritis yang tinggi atau bisa disebut *HOTS (higher order thinking skills)* dalam kegiatan belajar, individu menggunakan berbagai strategi, termasuk observasi, eksperimentasi, asosiasi, diskusi, dan komunikasi. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pembelajaran abad ke-21 (*4C: creativity, critical thinking, collaboration, dan communication*).

Berdasarkan pemaparan hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inisiatif memiliki tujuan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila meliputi rangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dalam suasana informal, dengan kerangka pembelajaran yang mudah beradaptasi dan tidak rumit, serta lebih interaktif. keterlibatan pendidikan. Selain itu, inisiatif ini memfasilitasi keterlibatan langsung dengan lingkungan terdekat, sehingga mendorong pengembangan kompetensi beragam yang berkontribusi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

b. Tahapan Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) terdapat tahapan perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, diantaranya:

- 1) Dibentuknya kelompok tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila
- 2) Menentukan tingkat kesiapan sekolah;
- 3) Mengembangkan parameter, kerangka konseptual, dan distribusi waktu untuk prakarsa yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara keseluruhan;
- 4) Membangun modul proyek; dan
- 5) Merencanakan teknis pelaporan hasil proyek;

Merujuk pada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) terdapat tujuh tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah ditentukan oleh kemendikbudristek yakni ada tema, “diantaranya:

- 1) Gaya Hidup Berkelanjutan;
- 2) Kearifan Lokal;
- 3) Bhineka Tunggal Ika;
- 4) Bangunlah Jiwa dan Raganya;
- 5) Suara Demokrasi;
- 6) Rekayasa dan Teknologi; dan
- 7) Kewirausahaan”;

c. Karakter yang di bangun Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila memiliki enam indikator yang disebutkan oleh Kemdikbud, antara lain:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Artinya peserta didik di Indonesia harus memiliki karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Peserta didik yang memiliki karakter tersebut adalah mereka yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia sadar akan ajaran agama dan keyakinannya sendiri, dan ia menerapkan pengetahuan ini dalam aktivitas sehari-hari.

- 2) Berkebhinekaan global

Dengan tetap menjaga keterbukaan pikiran saat berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, pelajar Indonesia menjaga kehormatan budaya, letak, dan identitas bangsanya. Akibatnya, semakin besar peluang untuk mengembangkan budaya baru yang positif dan tidak merusak budaya luhur bangsa. Elemen penting dari keragaman global termasuk memahami dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi lintas batas budaya ketika berinteraksi dengan orang lain, dan berpikir kritis tentang dan memiliki pengalaman keragaman.

3) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki bakat untuk bekerja kolaboratif, khususnya kapasitas untuk terlibat dalam usaha kolektif sukarela, sehingga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan lancar, mudah, dan efisien. Komponen dasar gotong royong mencakup prinsip kerjasama, kasih sayang, dan berbagi komunal.

4) Mandiri

Pelajar Indonesia menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, karena mereka memikul tanggung jawab penuh atas proses belajar mereka dan prestasi akademik selanjutnya. Komponen fundamental untuk mencapai kemandirian meliputi kesadaran diri, kesadaran situasional, dan pengaturan diri.

5) Penalaran kritis

Pelajar yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran kritis dan mampu memproses informasi secara baik, menjalin hubungan baik dengan orang lain, menganalisa informasi yang ada, menelaah manfaatnya, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan informasi. Konstituen penalaran kritis diantaranya perolehan dan asimilasi informasi dan konsep, pemeriksaan dan penilaian penalaran, dan perenungan pemikiran dan proses kognitif dalam konteks pengambilan keputusan.

6) Kreatif,

Pelajar yang memiliki kemampuan kreatif memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan menghasilkan hasil yang baru, signifikan, praktis, dan berpengaruh. Komponen dasar kreativitas mencakup penciptaan ide-ide baru

dan penciptaan karya dan tindakan orisinal, di samping kemampuan berpikir fleksibel untuk mengidentifikasi solusi alternatif untuk masalah (Kemendikbudristek, 2022).

3. Kurikulum Merdeka

a. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Perkembangan kurikulum di Indonesia saat ini sudah berganti kurang lebih 10 kali, yaitu dimulai dari kurikulum pada tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum tahun 1984, lalu kurikulum tahun 1994, selanjutnya kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kurikulum 2013, dan yang terakhir ialah Kurikulum Merdeka Belajar. Perkembangan-perkembangan tersebut dilakukan oleh yang berwenang untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Berikut tabel perkembangan kurikulum di Indonesia:

Tabel 2. 1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Tahun	Kurikulum	Keterangan
1968	Kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968	Kurikulum berbasis Pancasila pertama di Indonesia. Kurikulum 1968 menekankan pembentukan pada pembinaan Pancasila, pengetahuan yang dasar, dan bakat unik.
1975	Kurikulum Sekolah Dasar 1975	Kurikulum tahun 1975 sangat di tekankan pada tujuan dalam upaya menjadikan pendidikan lebih baik dan efisien. Dalam Prosedur Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSI) dijelaskan metode, materi, dan tujuan pembelajaran secara mendalam. Pada kurikulum ini di kenal dengan, "satuan pelajaran", atau rencana pelajaran untuk setiap satuan

		bahasan. Petunjuk umum, tujuan instruksional (TIK), materi topik, alat bantu belajar, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi ialah rincian tambahan untuk setiap satuan pembelajaran.
1984	Kurikulum 1984	Terdapat pendekatan keterampilan proses dalam kurikulum 1984. Meskipun memberikan prioritas pada pendekatan proses, aspek objektif tetap penting dilakukan. Posisi pelajar terdaftar sebagai subjek studi. Mengamati sesuatu, mengklasifikasikannya, membicarakannya, dan melaporkannya.
1994	Kurikulum 1994	Kurikulum ini ditekankan pada pengintegrasian kurikulum sebelumnya. Menurut Mudjito, “Semangatnya ingin menggabungkan Kurikulum tahun 1975 dan Kurikulum tahun 1984, antara metode proses”. Muatan lokal, seperti bahasa daerah, seni, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing daerah.
2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Menurut Ahmadi 2013 dalam Nurwiatin (2022), terdapat empat komponen kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yaitu kurikulum dan hasil belajar (KHB), penilaian berbasis kelas (PBK), kegiatan belajar mengajar (KBM), dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (PKBS)”.
2006	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	Pada kurikulum ini eksperimen KBK ditinggalkan pada awal tahun 2006, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) muncul. Tidak banyak perubahan dari kurikulum 2004 dalam hal target kompetensi pelajaran dan bagaimana pelajar harus mencapainya hingga evaluasi teknis. Perubahan yang paling terlihat ialah guru lebih diberi keleluasaan untuk mengatur pelajaran sesuai dengan setting dan

		keadaan sekolah
2013	Kurikulum 2013	Kurikulum 2013 ialah penyederhanaan usaha dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 membantu pelajar mengamati, mengajukan pertanyaan, memanfaatkan penalaran, dan membagikan apa yang mereka pelajari. Tujuan kurikuler 2013 meliputi aspek ekologi, sosial, seni, dan budaya.
2020	Kurikulum Darurat	Kurikulum darurat ialah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19.
2022	Kurikulum Merdeka Belajar	Kesulitan pendidikan Indonesia diperparah oleh epidemi COVID-19, yang mengarah ke Kurikulum Kebebasan Belajar. Mengembangkan kurikulum untuk memecahkan masalah persekolahan. Kurikulum pembelajaran mandiri menekankan minat dan kemampuan pelajar untuk mendorong kreativitas. Program ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berprinsip Pancasila yang luhur.

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Unsur-unsur sebagai pendukung perubahan kurikulum menurut Soetopo dan Soemanto 1991 dalam Nurwiatin (2022):

- 1) Penghapusan kontrol kolonial di beberapa bagian dunia. Setelah memperoleh kemerdekaannya, bangsa-bangsa ini mendapati bahwa sistem pendidikan tempat mereka dibesarkan tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip nasional kemerdekaan masing-masing negara. Untuk itu, mereka mulai merancang implementasi reformasi yang signifikan terhadap kurikulum dan sistem pendidikan saat ini.
- 2) Bidang teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di satu sisi, kemajuan dalam berbagai bidang akademik sains menyebabkan terungkapnya

teori-teori yang telah lama dipegang. Di sisi lain, kemajuan dalam sains, psikologi, dan komunikasi telah menghasilkan teori dan pendekatan baru dalam proses belajar mengajar. Dua perkembangan tersebut mendorong adanya modifikasi pada isi kurikulum dan strategi implementasinya.

- 3) Percepatan laju pertumbuhan populasi global Seiring bertambahnya populasi, kebutuhan akan pendidikan juga meningkat. Hal ini mengarah pada peninjauan dan, jika perlu, modifikasi strategi pendidikan yang saat ini digunakan untuk memenuhi permintaan pendidikan yang semakin meningkat.

b. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kemajuan sebuah bangsa khususnya dalam bidang pendidikan ditentukan oleh salah satu faktor yang paling penting yaitu pengembangan kurikulum. Kebijakan pendidikan yang baik dapat dilihat dari implementasi kurikulum yang diterapkan karena kurikulum merupakan jantungnya pendidikan yang menentukan berlangsung atau tidaknya pendidikan (Munandar A, 2017). Berdasarkan peraturan pperundang-undangan “(Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional), kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum Merdeka Belajar baru-baru ini diperkenalkan oleh pemerintah, khususnya oleh Kemendikbudristek, di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum merdeka belajar ialah kurikulum yang memadukan rangkaian kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Pendekatan ini diyakini lebih efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan kompetensi pada peserta didik, karena memberikan mereka cukup waktu untuk pemahaman dan penguatan keterampilan. Kurikulum belajar mandiri ialah kerangka kerja pendidikan yang mencakup pendekatan pembelajaran berbasis bakat dan minat.

Pendekatan pedagogis kurikulum merdeka menekankan pada melayani minat dan bakat individu pelajar, dengan tujuan menumbuhkan pola pikir yang kondusif untuk kreativitas. Kurikulum mandiri, seperti namanya, mengacu pada bentuk pendidikan yang menekankan pembelajaran mandiri dan mandiri. Hal ini sejalan

dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang berpendapat bahwa kemandirian mencakup lebih dari sekedar bebas dari perintah eksternal, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan sendiri yang kuat. Menurut prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara, konsep kemerdekaan pendidikan menekankan pada kebebasan hidup yang tidak terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, serta cakap mengatur hidup pribadinya dengan baik.

Menurut Kementerian Pendidikan Budaya Teknologi dan Riset, kurikulum merdeka harus dipelajari dahulu oleh guru sebelum mengajarkannya kepada peserta didik. Maka dari itu implementasi Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari bimbingan seorang guru, maka dari itu, guru memerlukan sebuah strategi dalam penerapannya yaitu menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Proyek tersebut disebut dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang diharapkan dapat memberikan lulusan yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

c. Tujuan Kurikulum Merdeka

Berbagai kajian nasional dan internasional secara konsisten menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergulat dengan krisis belajar yang berkepanjangan. Parahnya pandemi Covid-19 semakin diintensifkan oleh keadaan yang ada. Untuk mengatasi krisis pendidikan yang ada, sangat penting untuk menerapkan modifikasi sistematis, terutama melalui pembentukan kurikulum yang disempurnakan. Oleh karena itu, dalam menanggapi krisis pendidikan yang terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan kurikulum baru yang dikenal sebagai Kurikulum Mandiri (Kemdikbud, 2022).

Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar ini dilaksanakan dalam bentuk upaya mencapai tujuan nasional Pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar memiliki keunggulan dan dapat berdaya saing dengan rekan-rekan mereka di negara lain. Wujud kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing terlihat pada peserta didik yang berakhlak mulia dan menunjukkan kemampuan kognitif tingkat lanjut, khususnya pada ranah literasi dan numerasi.

d. Kelebihan Kurikulum Merdeka

Adapun kelebihan dari Kurikulum Merdeka ialah sebagai berikut:

1) Lebih sederhana dan mendalam

Penekanan inti dari Kurikulum Merdeka terletak pada materi esensial. Peserta didik lebih mungkin untuk menyerap pengetahuan secara efektif ketika mereka terlibat dalam proses pembelajaran yang langsung dan komprehensif, tanpa rasa urgensi atau tergesa-gesa. Integrasi desain yang menarik secara visual dalam metodologi pembelajaran mendalam memiliki potensi untuk meningkatkan konsentrasi pelajar dan meningkatkan minat dalam proses pembelajaran.

2) Lebih merdeka

Kurikulum Mandiri Mendikbud RI merupakan standar pembelajaran. Instruktur dapat mengkonstruksi proses pembelajaran untuk memenuhi tuntutan dan tujuan pembelajaran dengan kebebasan. Jika dilaksanakan, proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar akan lebih baik daripada yang tidak.

3) Lebih relevan dan interaktif

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang relevan dan interaktif dapat menghasilkan hasil yang positif dalam proses pembelajaran. Implementasi metodologi pembelajaran interaktif memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dan mendorong pengembangan kompetensi mereka. Melibatkan pelajar dalam pembelajaran interaktif melalui kegiatan berbasis proyek mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mengatasi masalah lingkungan.

e. Perbedaan Kurikulum 13 Dengan Kurikulum Merdeka

Perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, diantaranya:

Tabel 2. 2 Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka

	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
Kerangka Dasar	Tujuannya merujuk pada Sistem pendidikan Nasional	Tujuannya berorientasi pada Sistem Pendidikan Nasional

	dan Standar Nasional Pendidikan	dan Standar Nasional Pendidikan serta Pengembangan nilai-nilai luhur Profil Pelajar Pancasila.
Kompetensi yang dituju	Kompetensi Dasar (KD), disusun dalam kerangka lingkup dan urutan. Kompetensi tersebut selanjutnya dikategorikan menjadi empat Kompetensi Inti (KI), yaitu: Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan, dan Keterampilan.	Hasil belajar diartikulasikan dalam paragraf yang menyediakan kerangka kerja untuk perolehan, peningkatan, dan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, memperkuat, dan meningkatkan kompetensi.
Struktur Kurikulum	Alokasi JP diatur per minggu dan tersistem, serta berfokus pada pembelajaran intrakurikuler.	Alokasi JP diatur pertahun serta struktur kurikulum dibagi menjadi dua yaitu intrakurikuler dan kokurikuler.
Pembelajaran	Penerapan pendekatan saintifik dianjurkan untuk semua mata pelajaran dan berkas dalam ranah pembelajaran intrakurikuler. Sedangkan untuk kegiatan ko-kurikuler disarankan untuk membatasi beban belajar maksimal 50%.	Penguatan pembelajaran yang dibedakan. Pelaksanaan jam intrakurikuler sebanyak 70% sampai dengan 80% jam pembelajaran, 20%-30% diantaranya dikhususkan untuk kokurikuler dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Penilaian	Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, khususnya SD/SMP/SMA/SMK atau yang sederajat, pemanfaatan penilaian formatif dan sumatif digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan penilaian otentik pada berbagai mata pelajaran. Penilaian ini dikategorikan ke dalam tiga domain yang berbeda, yaitu evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	SD/SMP/SMA/SMK/Sederajat: Peningkatan asesmen formatif dan pemanfaatan hasil asesmen untuk menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan tingkat pencapaian pelajar, penguatan asesmen otentik, khususnya dalam proyek-proyek yang ditujukan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila, dan integrasi penilaian yang mengevaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan merupakan komponen penting.
-----------	---	---

Sumber: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah 2022

4. Warga Negara

a. Pengertian Warga Negara

Eksistensi suatu bangsa bergantung pada keberadaan warga negaranya. Kewarganegaraan ialah status hukum yang diberikan kepada individu dalam suatu negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang konsep kewarganegaraan di negara Republik Indonesia. Kewarganegaraan ialah status hukum yang diberikan kepada individu yang diakui sebagai anggota negara tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pengertian menurut AS Hikam bahwa “warga negara atau yang disebut dengan *citizenship*, yaitu anggota dari sebuah negara yang dimana akan membentuk warga negara itu sendiri”. Koerniatmanto dalam Abdin (2020), menyatakan bahwa “warga negara itu sebagai anggota dari sebuah negara, setiap warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya”. Singkatnya, individu yang diakui

sebagai warga negara ialah individu yang secara sukarela menjalin afiliasi yang mengikat dengan negara-bangsa tertentu. Konsekuensinya, kewarganegaraan dapat dipahami sebagai konstruksi relasional yang menggambarkan hubungan antara warga negara dan negaranya masing-masing (Kania, 2019). Selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan “(Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan) mengklasifikasikan siapa saja yang berhak disebut warga negara Indonesia, ialah:

- 1) Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan persyaratan hukum atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum berlakunya undang-undang ini.
- 2) Keturunan ayah Indonesia dan ibu Indonesia yang menikah secara sah.
- 3) Anak yang lahir dari ayah Indonesia dan ibu warga negara asing
- 4) Anak hasil perkawinan yang sah antara seorang ibu Indonesia dengan seorang ayah yang berkebangsaan asing.
- 5) Menurut ketentuan tempat asal bapak
- 6) Anak yang ayahnya berstatus warga negara Indonesia dan lahir dalam waktu 300 (tiga ratus) hari setelah kematian ayahnya dari perkawinan yang sah.
- 7) Keturunan seorang wanita warga negara Indonesia yang melahirkan di luar perkawinan.
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan dari ibu asing yang diakui sebagai anak dari ayah warga negara Indonesia sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah.
- 9) Anak yang lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak jelas status kewarganegaraan orang tuanya.
- 10) Seorang bayi baru lahir yang orang tuanya tidak diketahui ditemukan di tanah Republik Indonesia.

11) Anak yang baru lahir yang ayah dan ibunya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya dianggap sebagai penduduk negara Republik Indonesia;

12) Anak yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ayah dan ibu Indonesia yang menurut hukum negara tempat anak dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

13) Anak yang permohonan kewarganegaraannya disetujui oleh orang tuanya tetapi meninggal dunia sebelum diambil sumpah atau ikrar kesetiaan.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak memiliki arti tentang konsep-konsep seperti kebenaran, kepemilikan, keanggotaan, ketenangan, dan hak pilihan. Adapun pengertian hak menurut Raharjo (2014) “Hak ialah kesanggupan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh seseorang dan tidak dapat dipaksakan secara paksa kepada pihak lain”. Peneliti menegaskan bahwa hak mencakup kapasitas untuk memperoleh atau terlibat dalam tindakan yang dianggap dapat diterima atau dapat dianggap sebagai praktik kebiasaan. Dalam hal kewarganegaraan, seorang warga negara berhak atas taraf hidup yang terhormat, jaminan keselamatan, dan perlindungan hukum. Kewajiban ialah tugas yang harus di penuhi untuk mendapatkan hak istimewa. Kewajiban dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena sudah diberi haknya. Menurut Sudikno Mertokusumo “kewajiban ialah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam rangka menjalankan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat”. Hak dan kewajiban warga negara diatur dan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam UUD 1945. UUD 1945 menjamin hak-hak tertentu warga negara, termasuk hak asasi manusia, yang secara lengkap dituangkan dalam Pasal 28 perubahan kedua UUD.

c. Konsep Warga Negara yang Baik

Konsep karakter baik (*good character*) menurut Thomas Lickona (1991) yaitu “kebajikan dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu kebajikan yang

berorientasi pada diri sendiri dan kebajikan yang berorientasi pada orang lain, adalah konsep karakter yang unggul. Kebajikan yang berorientasi pada diri sendiri seperti pengendalian diri dan kesabaran adalah contoh dari keutamaan diri, kemauan untuk berbagi dan merasakan kesenangan merupakan contoh dari altruisme (kebajikan yang berorientasi pada orang lain)“.

Warga negara yang baik ialah warga negara yang taat akan peraturan yang berlaku di negaranya termasuk Indonesia. Warga negara yang baik akan mendorong negara menjadi negara yang baik pula. “Menurut sudut pandang etika, manusia berusaha untuk mengarahkan tindakan mereka menuju tujuan akhir keberadaan mereka sebagai manusia atau mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan standar yang menentukan bagaimana manusia harus hidup. Dia adalah tipe orang yang secara konsisten berusaha untuk hidup sesuai dengan perintah hati nuraninya atau sesuai dengan perasaannya tentang apa yang secara khusus merupakan kewajiban moralnya.” (Soedarminta 1997 dalam Winarno, 2012). Oleh karena itu, karakter unggul didefinisikan sebagai manusia yang mengikuti hati nuraninya, terlepas dari kualitas atau prestasi yang mendukungnya.

Konseptualisasi warga negara yang baik berbeda dengan manusia yang baik. Konsep "warga negara yang baik" memberikan penekanan yang signifikan pada individu yang memiliki atribut khusus, termasuk identitas yang berbeda, kepemilikan hak dan tanggung jawab, keterlibatan aktif dalam urusan publik, dan penerimaan nilai-nilai sosial (Cogan & Derricot 199, dlm Winarno 2012). Ukuran warga negara yang baik ditentukan oleh konstitusi negara masing-masing. Seseorang dianggap sebagai anggota masyarakat yang terpuji apabila sikap dan perilakunya sesuai dengan norma masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang berlaku. Dalam skenario ini, terlihat bahwa individu Indonesia yang berpegang pada Pancasila sebagai pedoman hidupnya mewujudkan cita-cita warga negara yang patut diteladani, karena tingkah laku dan perilakunya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam wacana kewarganegaraan, “warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) merupakan titik temu antara *civic confidence*, *civic competence* dan *civic commitment*. *Civic confidence* merupakan irisan dari *civic knowledge*

dan *civic dispositions*, *civic competence* merupakan irisan dari *civic knowledge* dan *civic skill* dan *civic commitment* merupakan irisan dari *civic dispositions* dan *civic skill*. Warga negara yang memiliki *civic knowledge*, *civic dispositions* dan *civic skill* ialah warga negara yang *confidence*, *competence* dan *commitment* yang selanjutnya disebut sebagai *smart and good citizen*” (Winarno, 2012). Selain itu, definisi hukum kewarganegaraan mencakup berbagai elemen, karena mencakup hubungan hukum, percabangan hukum, fungsi hukum, serta hak dan tanggung jawab (Kania, 2019 hlm 64).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa indikator warga negara yang baik sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pemahaman sebagai warganegara (*civics knowledges*);
- 2) Mempunyai kemampuan berwarganegara (*civics skills*); dan
- 3) Mempunyai rasa tanggung jawab kewarganegaraan (*civics responsibility*).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa judul penelitian yang sesuai dengan topik skripsi yang ditulis oleh penulis, antara lain:

- 1) Zakiyatul Nisa (2022) dengan judul penelitian “*Implementasi Keterampilan Pembelajaran Abad 21 Berorientasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo*”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek yang ditujukan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila dalam konteks pembelajaran abad 21 melalui serangkaian tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan tersebut di atas sejalan dengan tahapan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila dalam modul yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek.
- 2) Fifi Khoirillah dkk (2022) dengan judul penelitian “*Penguatan Pendidikan Karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SDN Banjaran 3 Kota Kediri*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dapat meningkatkan Pendidikan Karakter sesuai dengan tujuannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi seorang guru

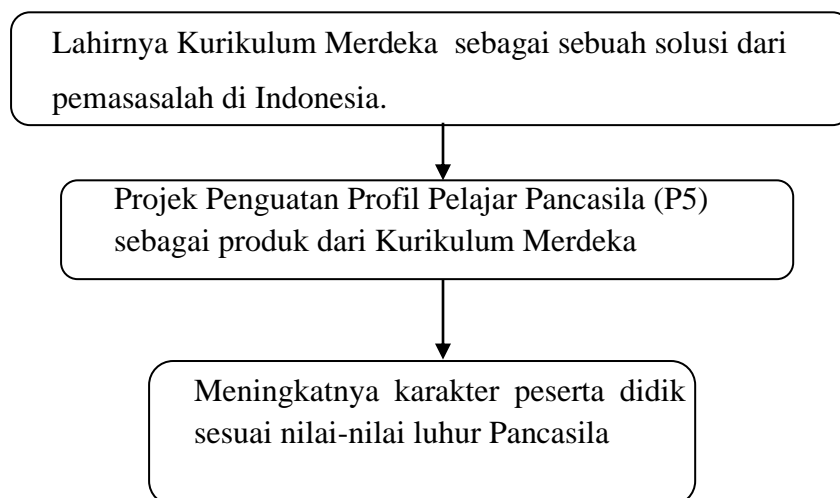
sebagai SDM utama yang membantu pelajar meningkatkan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai karakter Profil Pelajar Pancasila.

- 3) Andriani Safitri, Dwi Wulandari, dan Yusuf Tri Herlambang (2022) dengan judul penelitian *“Proyek Penguatan profil Pelajar Pancasila: Sebuah Orientasi Baru Pendidikan dalam Meningkatkan Karakter Peserta didik Indonesia”*. Penelitian ini menghasilkan bagaimana Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dapat membuat peserta didik di Indonesia memiliki karakter-karakter baik yang ditempuh melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

C. Kerangka Pemikiran

Lahirnya Kurikulum Merdeka merupakan sebuah penyelesaian dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam proses penerapannya, terdapat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai produk dari Kurikulum Merdeka yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sistem pendidikan di Indonesia dan dapat mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif sebagai wujud pembentukan warga negara yang baik.

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti (2023)